

BUPATI SITUBONDO PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI SITUBONDO NOMOR 49 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SITUBONDO NOMOR 47 TAHUN 2017 TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SITUBONDO,

Menimbang

- : a. bahwa berdasarkan hasil evaluasi Sistem Akuntabilitas Kineria Instansi Pemerintah Tahun 2018 oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia, Penetapan Indikator Kinerja Pemerintah Kabupaten Situbondo yang tercantum dalam RPJMD Kabupaten Situbondo Tahun 2016-2021 perlu ditinjau dan disesuaikan kembali berdasarkan prinsip perencanaan yang lebih terarah, terukur dan tepat dalam pelaporan pencapaian tujuan dan sasaran Kabupaten Situbondo:
 - b. bahwa dalam rangka percepatan penerapan implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Situbondo dan sebagai dasar dalam penyusunan Perjanjian Kinerja Bupati Situbondo Tahun 2018 dan Tahun 2019 serta pelaporan akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah Kabupaten Situbondo Tahun 2018, maka Peraturan Bupati Situbondo Nomor 47 Tahun 2017 tentang Indikator Kinerja Utama perlu diubah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Situbondo tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Situbondo Nomor 47 Tahun 2017 tentang Indikator Kinerja Utama;

Mengingat

 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19,

- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
- Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
- 7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
- 8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama:
- 9. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 10 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2016-2021 (Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2016 Nomor 8).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SITUBONDO NOMOR 47 TAHUN 2017 TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA

Pasal I

Ketentuan yang tercantum dalam Lampiran II.1 Indikator Kinerja Daerah Tahun 2016-2021 Pemerintah Kabupaten Situbonde dan Lampiran II.2 Indikator Sasaran (Impact) Tahun 2016-2021 Pemerintah Kabupaten Situbondo Peraturan Bupati Situbondo Nomor 47 Tahun 2017 tentang Indikator Kinerja Ulama (Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2017 Nomor 47), diubah sehingga berbunyi sebagaimana tersebut dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupat ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Situbondo.

> Ditetapkan di Situbondo Rada pangsal

> > BUPATI SITUBONDO,

NG WIGIARTO

Diundangkan di Situbende Pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SITUBONDO,

MATULLAH

BERITA DAERAH KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2018 NOMOR

II.1. MATRIK TUJUAN, INDIKATOR TUJUAN, SASARAN, INDIKATOR SASARAN PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2016-2021

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	FORMULASI PENGUKURAN	PD PENANGGUNGJAWAB
1 Meningkatkan kualitas SDM	1 IPM	1 Meningkatnya kualitas pendidikan	1 Indeks Pendidikan	I HLS + I RLS I Pendidikan = 2 I HLS = Indeks Harapan Lama Sekolah, cara menghitung: HLS - HLS min I HLS = HLS maks - HLS min I RLS = Indeks Rata-rata Lama Sekolah, cara menghitung: RLS - RLS min I RLS =	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		2 Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	2 Indeks kesehatan	Indeks Kesehatan = AHH – AHH min AHH maks – AHH min	Dinas Kesehatan
		3 Meningkatnya pendapatan masyarakat	3 PDRB per kapita	PDRB per kapita = PDRB x 100% Σ penduduk	Dinas Tenaga Kerja
2 Meningkatkan kesejahteraan masyarakat	2 Persentase Kemiskinan	4 Menurunnya angka pengangguran	4 Tingkat Pengangguran Terbuka	TPT = Jumlah Pengangguran Jumlah Angkatan Kerja	Dinas Tenaga Kerja

	TUJUAN		OIKATOR UJUAN		SASARAN		INDIKATOR SASARAN	FORMULASI PENGUKURAN	PD PENANGGUNGJAWAB
				5	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat	5	Jumlah Desa Maju	Jumlah desa maju pada tahun n	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa
				6	Meningkatnya kesejahteraan sosial	6	Persentase Penurunan PMKS	Jumlah PMKS tahun (n) - Jumlah PMKS tahun (n-1) Jumlah PMKS sampai dengan tahun (n)	Dinas Sosial
3	Meningkatkan perekonomian daerah dan pemerataan hasil pembangunan.		rtumbuhan onomi	7	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi unggulan daerah	7	Pertumbuhan PDRB sektor pertanian, kehutanan dan perikanan	(PDRB n - PDRB n-1) (*x 100% PDRB n *) PDRB Sektor pertanian, kehutanan dan perikanan	Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, Dinas Perikanan
		4 Inde Rat	eks Gini io			8	Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan	(PDRB n - PDRB n-1) (* x 100% PDRB n *) PDRB Sektor Industri Pengolahan	Dinas Perindustrian Perdagangan
						9	Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan besar dan eceran	(PDRB n - PDRB n-1) (*x 100% PDRB n *) PDRB Sektor Perdagangan besar dan eceran	Dinas Perindustrian Perdagangan
						10	Pertumbuhan PDRB Sektor Akomodasi	(PDRB n - PDRB n-1) (* x 100% PDRB n *) PDRB Sektor Akomodasi	Dinas Pariwisata

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN		SASARAN		INDIKATOR SASARAN		FORMULASI PENGUKURAN						PD PENANGGUNGJAWAB
		8	Meningkatnya investasi daerah	11	Nilai investasi PMA dan PMDN	Nila	ai investasi P	MA dan PMDN pa	da tahun n				Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		9	Meningkatnya kualitas infrastruktur yang berkelanjutan	12	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Indeks Kualitas Layanan Infratruktur	dim IPA IPU ITV	nana: = Indeks Port = Indeks Port = Indeks Tort = Indeks	A + 30% IPU + 40° encemaran Air encemaran Udara utupan Vegetasi eroleh dari hasil s la tahun n, denga	u survey kepuasan		rhadap pelayana:	n	Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan
					miratruktur		Nilai Persepsi	Nilai Interval (NI)	Nilai Interval Konversi (NIK)	Mutu Pelayanan (x)	Kinerja Unit Pelayanan (y)		Ruang
							1	1,00 - 2,5996	25,00 - 64,99	D	Tidak baik		
							2	2,60 - 3,064	65,00 - 76,60	С	Kurang Baik		
							3	3,0644 - 3,532	76,61 - 88,30	В	Baik		
							4	3,5324 - 4,00	88,31 - 100,00	A	Sangat Baik		

	TUJUAN		INDIKATOR TUJUAN		SASARAN		INDIKATOR SASARAN			F	ORMULASI PENG	GUKURAN		PD PENANGGUNGJAWAB
4	Meningkatkan birokrasi pemerintahan	5	Indeks Reformasi Birokrasi	10	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	14	IKM	Nila	i IKM pada t	tahun n				Sekretariat Daerah
	yang bersih, akuntabel, efektif dan		Bilokrasi		pelayanan publik				Nilai Persepsi	Nilai Interva (NI)	Nilai Interv Konversi (NIK)	Mutu Pelayanan (x)	Kinerja Unit Pelayanan (y)	
	efisien serta								1	1,00 - 2,599	6 25,00 - 64,9	9 D	Tidak baik	
	pelayanan publik yang								2	2,60 - 3,064	65,00 - 76,6	0 C	Kurang Baik	
	baik								3	3,0644 - 3,53	76,61 - 88,3	0 В	Baik	
									4	3,5324 - 4,0	0 88,31 - 100,0	00 A	Sangat Baik	
				11	Meningkatnya akuntabilitas kinerja	16	Kategori Evaluasi LPPD	Kat		si LPPD/EKPP				Sekretariat Daerah Sekretariat Daerah
							Sakip Kabupaten		TZ - 4	N T11	ai Interval (NI)	Interpre	4	
									Kateg AA		> 90 - 100	Sangat memuask		
											> 80 - 90			
									A		-	Memuaskan, Perubahan, berk dan sangat akunt	memimpin sinerja tinggi abel.	
									ВВ		> 70 - 80	Sangat Baik, berkinerja bail sistem manajer yang andal.	k, memiliki	
									В		> 60 - 70	Baik, Akuntabe sudah baik, me	l kinerjanya miliki sistem	

						17	> 80 - 90 > 70 - 80	Memuaskan, memimpin Perubahan, berkinerja tinggi dan sangat akuntabel.	
TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	ı	INDIKATOR SASARAN		BB	FORMULASI PEN	Sangat Baik, Akuntabel, berkinerja baik, memiliki sistem manajemen kinerja IGÜÄÜÄÄN	PD PENANGGUNGJAWAB
	1000					В	> 60 - 70	Baik, Akuntabel kinerjanya	
								sudah baik, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk manajemen kinerja, dan perlu sedikit perbaikan.	
						СС	> 50 - 60	Cukup (memadai), akuntabel kinerja cukup baik, taat kebijakan, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk memproduksi informasi kinerja untuk pertanggungjawaban, perlu banyak perbaikan tidak mendasar.	
						С	>30 - 50	Kurang, Sistem dan tatanan kurang dapat diandalkan, memiliki sistem untuk manajemen kinerja tapi perlu banyak perbaikan minor dan perbaikan yang mendasar.	
						D	0 - 30	Sangat Kurang, Sistem dan tatanan tidak dapat diandalkan untuk penerapan manajemen kinerja, perlu banyak perbaikan, sebagian perubahan yang sangat mendasar.	
		12 Meningka kualitas ta kelola keu dan aset	ıta	17 Nilai Opini Laporan Keuangan oleh BPK	Has	sil Opini BPK terhada	p Laporan Keuangan	Daerah pada tahun n	Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Perumahan Dan Kawasan Pemukiman, Dinas Lingkungan Hidup

Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Dinas Perdagangan Perindustrian, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Dinas Sosial

Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlingungan Anak, Dinas Sosial

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Dinas Ketahanan Pangan

Dinas Koperasi dan Usaha Mikro

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Badan Pengelolaan Penatausahaan Keuangan Daerah, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Dinas Pariwisata, Dinas Pekerjaan Umum dan Pekerjaan Umum, Badan Kesatuan Bangsa Politik

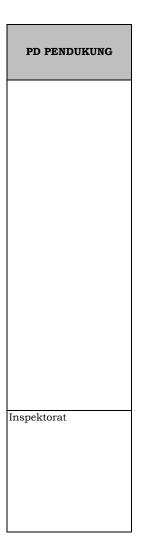
Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman, Dinas Perhubungan, Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian

Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman, Dinas Perhubungan, Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian

Sekretariat Daerah, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kecamatan, Dinas Kesehatan (RSUD), Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Dinas Pehubungan, Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian, Sekretariat DPRD, Satuan Polisi Pamong Praja, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Dinas Komunikasi Informatika Dan Persandian

Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Dinas Komunikasi Informatika Dan Persandian



II. 2. INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2016-2021

FORMULASI PENGUKURAN
Dimensi Kesehatan: $I_{kesehatan} = \frac{AHH - AHH_{min}}{AHH_{maks} - AHH_{min}}$ Dimensi Pendidikan: $I_{HI.S} = \frac{HLS}{IILS_{maks} - IILS_{min}}$ $I_{RIS} = \frac{RLS}{RI.S_{maks} - RI.S_{min}}$ $I_{RLS} = \frac{RLS_{min}}{RI.S_{maks} - RI.S_{min}}$ $I_{pondidikan} = \frac{I_{HLS} + I_{RLS}}{2}$ Dimensi Pengeluaran: $I_{pengeluaran} = \frac{\ln(pengeluaran) - \ln(pengeluaran_{min})}{\ln(pengeluaran_{maks}) - \ln(pengeluaran_{min})}$ $Rumus Perhitungan IPM:$ $IPM = \sqrt[2]{I_{kesehatan} \times I_{pendidikan} \times I_{pengeluaran}}$
$IPM = \sqrt[3]{I_{kesehatan} \times I_{pendidikan} \times I_{pengeluaran}}$
A

FORMULASI PENGUKURAN
aris Kemiskinan (GK) umus Penghitungan: $K = GKM + GKNM$ $K = Garis Kemiskinan$ $KM = Garis Kemiskinan Makanan$ $KNM = Garis Kemiskinan Non Makan$ ersentase Penduduk Miskin umus Penghitungan: $P_{\alpha} = \frac{1}{N^2} \sum_{i=1}^{q} \left[\frac{z - y_i}{z} \right]^{\alpha}$ = 0 = garis kemiskinan. =Rata-rata pengeluaran per kapita sebulan penduduk yang berada dibawah garis eniskinan (i=1, 2, 3,, q), yi < z = Banyaknya penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan. = jumlah penduduk.
<u>u</u> K K K e <u>u</u> = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PENGUKURAN
4 Pertumbuhan Ekonomi	Rumus menghitung gini ratio: $G = 1 - \sum_{i=1}^k P_i(Q_i + Q_{i-1})$ dimana: Pi : persentase rumahtangga atau penduduk pada kelas ke-i Qi : persentase kumulatif total pendapatan atau pengeluaran sampai kelas ke-i Nilai gini ratio berkisar antara 0 dan 1, jika: $G < 0,3 = \text{ketimpangan rendah}$ $0,3 \le G \le 0,5 = \text{ketimpangan sedang}$ $G > 0,5 = \text{ketimpangan tinggi}$ Rumus perhitungan PDRB : $\frac{PDRB_{[t+1]} \text{-}PDRB_{[t]}}{PDRB_{[t]}} \times 100\%$ dimana: $t+1 = \text{tahun pengamatan PDRB sebelumnya}$

INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PENGUKURAN
5 Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks Reformasi Birokrasi diperoleh dari pengukuran Komponen Pengungkit dan Hasil yang diupload secara online pada situs PMPRB online yaitu pmprb.menpan.go.id. Indeks Reformasi Birokrasi diukur melalui: A. Komponen Pengungkit (60): I. Manajemen Perubahan (5) II. Penataan Peraturan Perundang-undangan(5) III. Penataan dan Penguatan Organisasi (6) IV. Penataan Tatalaksana (5) V. Penataan Sistem Manajemen SDM (15) VI. Penguatan Akuntabilitas (6) VII. Penguatan Pengawasan (12) VIII. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik (6) B. Hasil (40): I. Pemerintahan yang Bersih dan Bebas KKN (10) II. Kualitas Pelayanan Publik (10) III. Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Organisasi (20)

INDIKATOR KINERJA UTAMA		FORMULASI PENG	UKURAN
	Kategori	Nilai Interval (NI)	Interpretasi
	AA	> 90 - 100	Istimewa
	A	> 80 - 90	Memuaskan
	BB	> 70 - 80	Sangat Baik
	В	> 60 - 70	Baik, perlu sedikit perbaikan
	CC	> 50 - 60	Cukup (memadai), perlu banyak perbaikan yang tidak mendasar
	С	>30 - 50	Kurang, perlu banyak perbaikan, termasuk perubahan yang mendasar
	D	0 - 30	Sangat Kurang,

				mendasar	
		С	>30 - 50	Kurang, perlu banyak perbaikan, termasuk perubahan yang mendasar	
		D	0 - 30	Sangat Kurang,	
K	INDIKATOR INERJA UTAMA		FORMULASI PENG	UKURAN	

INDIKATOR KINERJA UTAMA FORMULASI PENGUKURAN	
--	--

IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya.

IPM diperkenalkan oleh UNDP pada tahun 1990 dan dipublikasikan secara berkala dalam laporan tahunan Human Development Report (HDR).

IPM dibentuk oleh 3 (tiga) dimensi dasar:

- 1. Umur panjang dan hidup sehat (a long and healthy life)
- 2. Pengetahuan (knowledge)
- 3. Standar hidup layak (decent standard of living)

IPM merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk).

IPM dapat menentukan peringkat atau level pembangunan suatu wilayah/negara.

Bagi Indonesia, IPM merupakan data strategis karena selain sebagai ukuran kinerja Pemerintah, IPM juga digunakan sebagai salah satu alokator penentuan Dana Alokasi Umum (DAU).

Persentase penduduk miskin adalah persentase penduduk yang masuk kategori miskin terhadap jumlah penduduk. Penduduk miskin dihitung berdasarkan garis kemiskinan. Garis kemiskinan adalah nilai rupiah pengeluaran per kapita setiap bulan untuk memenuhi standar minimum kebutuhan-kebutuhan konsumsi pangan dan non pangan yang dibutuhkan oleh individu untuk hidup layak. Data kemiskinan yang baik dapat digunakan untuk: a) Mengevaluasi kebijakan pemerintah terhadap kemiskinan; b) Membandingkan kemiskinan antar waktu, antar daerah; dan c) Menentukan target penduduk miskin dengan tujuan untuk memperbaiki posisi mereka.

Untuk mengukur kemiskinan, BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (basic needs approach). Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Dengan pendekatan ini, dapat dihitung Head Count Index (HCI), yaitu persentase penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan.

Metode yang digunakan adalah menghitung garis kemiskinan (GK), yang terdiri dari dua komponen yaitu garis kemiskinan makanan (GKM) dan garis kemiskinan bukan-makanan (GKBM). Penghitungan garis kemiskinan dilakukan secara terpisah untuk daerah perkotaan dan perdesaan. Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita perbulan dibawah garis kemiskinan.

Indeks Gini atau Koefisien Gini merupakan indikator yang menunjukkan tingkat ketimpangan pendapatan secara menyeluruh. Nilai Koefisien Gini berkisar antara 0 hingga 1.

Koefisien Gini bernilai 0 menunjukkan adanya pemerataan pendapatan yang sempurna, atau setiap orang memiliki pendapatan yang sama. Sedangkan, Koefisien Gini bernilai 1 menunjukkan ketimpangan yang sempurna, atau satu orang memiliki segalanya sementara orang-orang lainnya tidak memiliki apa-apa. Dengan kata lain, Koefisien Gini diupayakan agar mendekati 0 untuk menunjukkan adanya pemerataan distribusi pendapatan antar penduduk.

Pertumbuhan ekonomi adalah proses perubahan kondisi perekonomian suatu negara secara berkesinambungan menuju keadaan yang lebih baik selama periode tertentu. Pertumbuhan ekonomi dapat diartikan juga sebagai proses kenaikan kapasitas produksi suatu perekonomian yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan pendapatan nasional. Adanya pertumbuhan ekonomi merupakan indikasi keberhasilan pembangunan ekonomi.Di bidang pembangunan ekonomi, salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi perekonomian secara makro adalah data produk domestik regional bruto (PDRB). Terdapat 2 (dua) jenis penilaian produk domestik regional bruto (PDRB) dibedakan dalam dua jenis penilaian yaitu atas dasar harga berlaku dan atas dasar harga konstan. Penyajian PDRB atas dasar harga konstan mengalami perubahan mendasar sebagai konsekuensi logis berubahnya tahun dasar yang digunakan. Selain menjadi bahan dalam penyusunan perencanaan, angka PDRB juga bermanfaat untuk bahan evaluasi hasil-hasil pembangunan yang telah dilaksanakan. Adapun beberapa kegunaan angka PDRB ini antara lain: a) Untuk mengetahui tingkat pertumbuhan ekonomi dan pertumbuhan setiap sektor ekonomi; b) Untuk mengetahui struktur perekonomian; c) Untuk mengetahui besarnya PDRB perkapita penduduk sebagai salah satu indikator tingkat kemakmuran/kesejahteraan; dan d) Untuk mengetahui tingkat inflasi/deflasi, berdasarkan pertumbuhan/perubahan harga produsen.

Komponen Pengungkit:

1. Manajemen Perubahan

Manajemen perubahan bertujuan untuk bertujuan untuk mengubah secara sistematis dan konsisten dari sistem dan mekanisme kerja organisasi serta pola pikir dan budaya kerja individu atau unit kerja di dalamnya menjadi lebih baik sesuai dengan tujuan dan sasaran reformasi birokrasi.

2. Penataan Peraturan Perundang-undangan

Penataan Peraturan Perundang-undangan bertujuan untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan peraturan perundangundanganyang dikeluarkan oleh instansi pemerintah.

3. Penataan dan Penguatan Organisasi

Penataan dan penguatan organisasi bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas organisasi instansi pemerintah secara proporsional sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas masingmasing, sehingga organisasi instansi pemerintah menjadi tepat fungsi dan tepatukuran (right sizing).

4. Penataan Tatalaksana

Penataan tatalaksana bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem, proses, dan prosedur kerja yang jelas, efektif,efisien,dan terukur pada masing-masing instansi pemerintah.

i Interval (NI)	Interpretasi
> 90 - 100	Istimewa
> 80 - 90	Memuaskan
> 70 - 80	Sangat Baik
> 60 - 70	Baik, perlu sedikit perbaikan
> 50 - 60	Cukup (memadai), perlu banyak perbaikan yang tidak mendasar
>30 - 50	Kurang, perlu banyak perbaikan, termasuk perubahan yang mendasar
0 - 30	Sangat Kurang,

5. Penataan Sistem Manajemen SDMAparatur

Penataan sistem manajemen SDM aparatur bertujuan untuk meningkatkan profesionalisme SDM aparatur pada masing-masing instansi pemerintah,yang didukung oleh sistem rekrutmen dan promosi aparatur berbasis kompetensi, transparan ,serta memperoleh gaji dan bentuk jaminan kesejahteraan yang sepadan

6. Penguatan Pengawasan

Penguatan pengawasan bertujuan untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yangbersih dan bebas KKN pada masing-masing instansi pemerintah.

7. Penguatan Akuntabilitas Kinerja

Program ini bertujuan untukmeningkatkan kapasitas dar akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

8. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Peningkatan kualitas pelayanan publik bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik pada masing-masing instansi pemerintah sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat.

0 - 30	Sangat Kui	rang,	
>30 - 50	Kurang, perbaikan, perubahan	perlu yang me	banyak termasuk ndasar
	mendasar		

Komponen Hasil:

- 1. Terwujudnya Pemerintahan Yang Bersih Dan Bebas KKN Sasaran terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas KKN diukur dengan menggunakan ukuran:
- a. Nilai persepsi korupsi(survei eksternal)
- b. Opini Badan Pemeriksa Keuangan atas laporan keuangan instansi pemerintah.
- 2. Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Kepada Masyarakat

SasaranTerwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat diuku rmelalu inilai persepsi kualitas pelayanan (survei eksternal)

- 3. Meningkatnya Kapasitas Dan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi Sasaran meningkatnyakapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi diukur melalui
- a. Nilai akuntabilitas kinerja
- b. Nilai kapasitas organisasi (survei internal)

Komponen Hasil: 1. Terwejudrye Pemerntahan Yang Borsih Dan Bebas KKS Sasaran Terwejudrye Pemerntahan Yang Borsih dan bedakara dengan menggunakan ukuran: a. Malai persepat korupajanakan ukuran: a. Malai persepat korupajanakan ukuran: b. Opini Budan Perreriksa Korungan atas laporan kinstansi pemernitak: 2. Terwejudrya Pemigkatar Kualitas Pelayanan Publik Masyarakat SasaranTerwejudrya, peringkatar Kualitas Pelayanan Publik Masyarakat SasaranTerwejudrya, peringkatar Kualitas pelayanan kepada masyarakat didua melalu hida persepsi pelayanan kualitas ban Akuntabilitas Kineria didua melalu hida persepsi pelayanan kualitas ban Akuntabilitas didukan melalu hida persepsi obayanan kualitas ban Manatabilitas kineria b. Miai kapusitas organisasi (survei Internal) b. Miai kapusitas organisasi (survei Internal)	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PENGUKURAN	KETERANGAN
			Komponen Hasil: 1. Terwijudaya Pemerntahan Yang Borsih Dan Bebas KKN Sasaran terwijudaya pemerntahan yang bersih dan bebas KKN diukni dengan menggunakan ukuran: a. Mai persepsi koruysi(survei eksternal) b. Opini Budan Pemeriksa Ketangan atas laporan ketangan instansi pemerintah. 2. Terwujudaya Pemeriksa Ketalitas Pelayanan Publik Kepada Masyanakat diuku melalu inilai persepsi kualitas kepada masyanakat diuku melalu inilai persepsi kualitas pelayanan (survei eksternal) 3. Meningkanya Kapasitas Dan AkinetabilitasKinerja Biroknasi Sasaran meningkatnyakapasitas dan akuntabilitas kinerja piroknasi a. Nilai akuntabilitas kinerja b. Nilai kapasitas organisasi (survei internal)

